

# Pengembangan Kawasan Minapolitan di Wilayah Pesisir Kabupaten Karawang Menggunakan Konsep Sharing Economy

*Development of Minapolitan Area in Karawang Regency Coastal Region Using Sharing Economy Concept*

**Kinkin Hanif Robani Herdiat, Asnita Frida Sebayang**

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung

\*E-mail Korespondensi: [kherdiyat@gmail.com](mailto:kherdiyat@gmail.com)

Artikel Masuk : Januari 2022

Artikel Diterima : Maret 2022

Tersedia Online : Maret 2022

**Abstrak.** Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Karawang sudah meluncurkan program minapolitan, salah satunya dengan sudah disusunnya *Master plan* pengembangan kawasan perikanan terpadu (minapolitan), kemudian dalam keputusan Bupati Karawang No 523/Kep.399 - Hukum/2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Industrialisasi Perikanan Budidaya Tahun 2014. Saat ini konsep *Sharing Economy* sebagai model ekonomi yang sudah banyak diterapkan, dimana orang atau sekelompok orang mampu menghasilkan uang dari sumber daya miliknya yang diutulisasi sehingga memberi jasa bagi orang atau sekelompok orang lain, melalui pelantara *online*. Hasil analisis penelitian pada penentuan pusat kawasan Kecamatan Cilamaya Wetan belum layak untuk ditetapkan sebagai kawasan minapolis karena belum menjalankan fungsinya dengan sesuai yaitu sebagai kawasan minapolis. Hasil analisis potensi *Sharing Economy* menunjukkan masyarakat dinilai belum siap untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan berbasis ICT karena masyarakat belum mahir untuk mengaplikasikannya, sedangkan pada ketersediaan fasilitas ICT masih belum merata dan perlu untuk ditingkatkan. Pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir karawang menggunakan konsep *Sharing Economy* memiliki 3 (tiga) strategi utama yang dapat dilakukan yaitu harus mengembangkan pengolahan dan produksi budidaya ikan bandeng, peningkatan penguatan kelembagaan (UPP) untuk menjalin kerjasama antar kelompok dan pemerintah di bidang teknologi, dukungan pembangunan sarana dan prasarana minapolitan serta fasilitas ICT (penguasaan ICT) oleh SKPD di Kabupaten/Kota

**Kata kunci:** Pengembangan Kawasan Minapolitan, Konsep Sharing Economy

**Abstract.** *Since 2011 the government of Karawang has launched the minapolitan program, one of which has been arranged by the Master Plan for integrated fisheries development (Minapolitan), then in the Karawang Regent Decree No. 523 / Kep.399 - Law / 2014 concerning Establishment of Minapolitan Area Development in Aquaculture Industrialization In 2014. At present the concept of Sharing Economy is an economic model that has been widely applied, where people or groups of people are able to make money from their resources that are written so that they provide services to other people or groups of people, through online brokers. The results of the analysis of the research on the determination of the central area of the Cilamaya Wetan have not been feasible to be designated as the Minapolis area because they have not carried out their functions appropriately, namely as the Minapolis region. The gap between reality and expectations in Minapolitan supporting facilities and ICT facilities, the results of the analysis of the Sharing Economy potential show that the community is not ready to carry out ICT-based economic activities because the community is not yet capable of applying it, while the availability of ICT facilities is still uneven and needs to be improved. The development of the Minapolitan area in the Karawang coastal area using the Sharing Economy concept has 3 (three) main strategies that can be done, namely having to develop the processing and production of milkfish cultivation, increasing institutional strengthening (UPP) to establish cooperation between groups and governments in technology, development support Minapolitan facilities and infrastructure as well as ICT facilities (ICT mastery) by SKPD in the Regency/City.*

**Keywords:** *Development of minapolitan area, Concept of sharing economy*



## Pendahuluan

Peraturan Menteri Perikanan nomor 12/2010 tentang Minapolitan menyatakan bahwa kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan cara konsep minapolitan dimana salah satu tujuan konsep ini untuk mengembangkan kawasan ekonomi unggulan menjadi lebih produktif (Abdullah et al., 2018).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang 2011-2030, kawasan minapolitan budidaya tambak di Kabupaten Karawang telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis Kabupaten Karawang dalam kategori kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi. Kawasan Minapolitan Kabupaten Karawang memiliki potensi perikanan tambak yang besar, komoditas perikanan tambak di Kabupaten Karawang mempunyai potensi ekspor, sumber daya infrastruktur yang mendukung seperti saluran irigasi, jalan, listrik, dan sebagainya. Komoditas unggulan budidaya perikanan perairan tawar di Kawasan Minapolitan Kabupaten Karawang adalah ikan bandeng, ikan nila, udang windu, udang galah dan lele. (*Master Plan Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu (Minapolitan) di Kabupaten Karawang, 2011*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 523/Kep.399 - Hukum/2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Industrialisasi Perikanan Budidaya Tahun 2014 disebutkan ada 6 Kecamatan yang termasuk kedalam lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan diantaranya Kecamatan Cilamaya Wetan, Kecamatan Cilebar, Kecamatan Pedes, Kecamatan Cibuyaya, Kecamatan Tirtajaya dan Kecamatan Banyusari, kemudian dengan sudah ditetapkannya Kecamatan Cilamaya Wetan, sebagai Kawasan Minapolis karena secara fisik lingkungan umumnya layak untuk budidaya tambak, berdasarkan sistem pusat pelayanan memenuhi syarat sebagai PKL, Kecamatan Cilamaya Wetan sentra produksi Ikan Bandeng dan Udang serta Kecamatan Cilebar sebagai sentra produksi Udang merupakan lokasi ideal sentra produksi tambak yang layak dipertimbangkan menjadi minapolis karena memiliki status kawasan SPS, SPU, dan SPPU.

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan perikanan di Kabupaten Karawang yang berdaya saing serta meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan para nelayan dan petambak, peran pemerintah jelas sangat dibutuhkan. Disamping peranan pengelolaan dan pemberi iklim yang kondusif, pemerintah perlu berperan secara langsung khususnya dalam aspek-aspek yang belum dapat ditangani oleh swasta maupun masyarakat nelayan, seperti pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan pelabuhan perikanan terpadu, penyuluhan, penelitian agar mampu membuat perubahan yang semakin baik diperlukan penelitian dan pengembangan yang terencana dengan baik untuk mendukung upaya pencapaian daya saing perikanan nasional dan pengembangan pendidikan di pengembangan kemampuan nelayan pelabuhan dan petambak perikanan untuk pengembangan kemampuan bisnis dan manajerial (Saragih et al., 2018).

Konsep *Sharing Economy* adalah Model ekonomi dimana orang atau sekelompok orang mampu menghasilkan uang dari sumber daya miliknya yang diutulisasi sehingga memberi jasa bagi orang atau sekelompok orang lain, melalui pelantara *online platform* (Sundararajan, 2017). Ekonomi berbagi merupakan cara kreatif untuk memaksimalkan penggunaan (utilisasi) sumberdaya milik masyarakat.

Keberadaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Karawang saat ini kurang berhasil berdasarkan penelitaian awal terdapat kekurangan dalam hal informasi produksi dan pemasaran dengan demikian dianggap perlu dikembangkan secara lebih dalam melalui penerapan konsep *Sharing Economy* pada kawasan minapolitan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, maka dalam penelitian ini di harapkan dapat menghasilkan sebuah pemikiran baru dan posisi sumbangannya terhadap konteks penataan ruang yang kaitannya dengan infrastruktur (Purnomo, 2012) dan penguasaan ICT (Isa & Ibrahim, 2021) melalui konsep *Sharing Economy* termasuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan para petambak serta mengurangi gap dalam penataan ruang pada kawasan minapolitan di Kabupaten Karawang sehingga memunculkan konsep penataan ruang yang baru dalam pengembangan kawasan minapolitan yang lebih maju, mandiri dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi struktur ruang (keberadaan fasilitas ICT) di kawasan minapolitan, mengidentifikasi jumlah penyebaran sarana dan prasarana penunjang kawasan minapolitan, mengidentifikasi potensi konsep *Sharing Economy* yang ada di kawasan minapolitan dan merumuskan strategi yang dilakukan agar penerapan konsep *Sharing Economy* dapat diterapkan di kawasan minapolitan.

Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai minapolitan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah penelitian Suryawati dan Purnomo (2011) mengenai keberlanjutan minapolitan, penelitian Firdaus dkk (2017) dan Utpalasari dan Anwar (2018) mengenai budidaya minapolitan, penelitian Fatmawaty dkk (2018), Apriliani dkk (2011), dan Rohayah dan Hendarto (2020) tentang pengembangan kawasan, penelitian Erwin dkk (2018) mengenai optimalisasi klaster minapolitan, penelitian Nugroho dkk (2020) dan Erlina dan Manadiyanto (2012) dan Agustine (2017) mengenai strategi pengembangan minapolitan, penelitian Lamia dkk (2017) dan Surbakti dkk (2019) tentang sarana dan prasarana, penelitian Jamilah dan Mawardati (2019) tentang pengentasan kemiskinan di kawasan minapolitan, penelitian Santoso dkk (2019) tentang kebijakan, dan penelitian Yusuf dkk (2021) mengenai dampak pengembangan minapolitan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan menekankan pada content analysis yang dilanjutkan dengan melaksanakan gap analysis (*Importance Performance Analysis*) dan SWOT sehingga dihadirkan konsep-konsep baru beserta strategi spesifik dalam menginternalisasi konsep baru pada konteks pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir Kabupaten Karawang.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan kuesioner yang di sebar di 6 kecamatan dan 14 desadengan jumlah sampel sebesar 96 responden. Penelitian ini menggunakan *teknik probability sampling* yaitu *proportionate stratified random sampling* yang dilakukan dengan metode undian dengan menggunakan rumus Fischer. Teknik pengambilan sampel ini digunakan pada populasi yang memiliki susunan berlapis, dalam arti sampel atau responden terpilih merupakan responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan *confidence level* sebesar 95 % dengan *margin error* sebesar 10 %.

## Hasil dan Pembahasan

### *Analisis Aksesibilitas*

Dari hasil analisis aksesibilitas yang telah dilakukan Desa Cicinde Utara dan Cicinde Selatan yang terletak pada Kecamatan Banyusari memiliki range tinggi (T) dengan skor 3 hal ini di karenakan kondisi aksesibilitas pada kedua desa tersebut dilalui antara jalan lokal primer dengan jalan kolektor primer dengan kondisi jalan yang baik, serta memiliki kemudahan untuk menempuh lokasi tersebut dan dapat dicapai melalui transportasi baik itu mobil maupun sepeda motor (ketersediaan angkutan transportasi yang sangat baik). Selain itu jarak dari pusat kegiatan (kecamatan dan pasar) tidak terlalu jauh. Sedangkan desa atau kecamatan yang lainnya memiliki range yang rendah (R) dengan skor 1 hal ini karena kondisi jalan yang dinilai tidak baik antara jalan lokal primer dengan jalan kolektor primer. Sehingga lokasi tersebut tidak mudah untuk dijangkau melalui angkutan transportasi ini menyebabkan terbatasnya angkutan transportasi di wilayah tersebut. Serta jarak dari pusat kegiatan (kecamatan dan pasar) yang cukup jauh.

### *Analisis Indeks Sentralitas*

Dari hasil analisis indeks sentralitas yang telah dilakukan, hirarki I (tinggi) Desa Muara Baru dan Sukaerta (Kecamatan Cilamaya Wetan) karena memiliki range tinggi dengan bobot total 6 hal ini menunjukkan jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang ada tinggi (sudah memadai) menurut *Master plan* pengembangan kawasan perikanan terpadu (minapolitan) di Kabupaten Karawang tahun 2011 ditetapkan sebagai kawasan minapolis (pusat sentra). Kriteria kawasan minapolis sebagai berikut: pusat koleksi komoditas perikanan sebagai bahan mentah industri, sebagai pusat perdagangan lokal dan antar daerah maupun antar pulau dengan adanya aktivitas perekonomian serta sarana dan prasarana

komoditas unggulan daerah, kota perdagangan yang berorientasi ekspor keluar daerah kawasan maupun keluar dari daerah Kabupaten atau Provinsi, koperasi dan informasi pasar barang dagangan, pusat berbagai kegiatan (*final manufacturing*) industri perikanan (*packing*) stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditi, pusat berbagai pelayanan, pusat perdagangan wilayah ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir depo, dan pergudangan serta pusat kegiatan agrobisnis.

### ***Analisis Skalogram***

Berdasarkan analisis skalogram yang telah dilakukan hirarki I berada pada Desa Sukakarta, Desa Muara dan Desa Muarabaru (Kecamatan Cilamaya Wetan), Desa Cicinde Utara dan Desa Cicinde Selatan (Kecamatan Banyusari) karena memiliki range dengan kategori tinggi pada sentralisasi fasilitas, indikator penduduk dan range tinggi pada aksesibilitas. Hirarki 2 berada pada Desa Pusaka Jaya Utara dan Desa Mekarpoaci (Kecamatan Cilebar) Desa Cemara Jaya (Kecamatan Cibuaya) dan Desa Tambaksari (Kecamatan Tirtajaya) karena memiliki range dengan kategori sedang berdasarkan sentralisasi fasilitas, indikator penduduk dan aksesibilitas. Sedangkan untuk hirarki 3 berada pada Pusaka Jaya Selatan (Kecamatan Cilebar), Desa Sungai Buntu (Kecamatan Pedes), Desa Sedari (Kecamatan Cibuaya), Desa Tambak Sumur (Kecamatan Tirtajaya), karena memiliki range dengan kategori rendah berdasarkan sentralisasi fasilitas, indikator penduduk dan aksesibilitas.

### ***Analisis GAP Jumlah dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Minapolitan***

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian tertinggi adalah indikator lembaga masyarakat (kelompok tambak/pengolahan) yakni sebesar 92,29%, diketahui rata-rata skor kenyataan pada indikator lembaga masyarakat (kelompok tambak/pengolahan) sebesar 4,11 dan rata-rata skor harapan sebesar 4,46 dengan Gap sebesar -0,34 dan tingkat kesesuaian paling rendah yakni sebesar 34,69% diketahui rata-rata skor kenyataan pada indikator telepon rumah sebesar 1,42 dan rata-rata skor harapan sebesar 4,08 dengan Gap sebesar -2,67. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat merasa lembaga masyarakat (kelompok tambak/pengolahan) merupakan sarana yang paling tinggi nilainya dibandingkan variabel lainnya di karenakan masyarakat merasa sudah puas akan keberadaan kelompok petambak/pengolahan perikanan di kawasan minapolitan tersebut sedangkan pada indikator telepon rumah masyarakat merasa tidak puas/kurang puas karena masyarakat lebih memilih menggunakan smartphone yang lebih praktis.

Tingkat kesesuaian yang dapat dilihat dari 23 indikator, diketahui bahwa indikator nomor 1 yaitu mengenai "Lembaga masyarakat (kelompok tambak/nelayan)" merupakan indikator dengan tingkat kesesuaian tertinggi dengan persentase tingkat kesesuaian sebesar 92,29%, hal ini berarti masyarakat menilai ketersediaan Lembaga masyarakat (kelompok tambak/nelayan) di 6 kecamatan yakni Kec. Cilamaya Wetan, Kec. Banyusari, Kec. Cilebar, Kec. Pedes, Kec. Cibuayadan Kec. Tirtajaya dinilai sangat baik/sangat memadai meskipun belum terpenuhi secara keseluruhan. Sedangkan untuk tingkat kesesuaian terendah terdapat pada indikator nomor 19, yaitu mengenai "Telepon Rumah" dengan persentase tingkat kesesuaian sebesar 34,69%, hal ini berarti masyarakat menilai telepon rumah di 6 kecamatan yakni Kec. Cilamaya Wetan, Kec. Banyusari, Kec. Cilebar, Kec. Pedes, Kec. Cibuayadan Kec. Tirtajaya dinilai kurang baik/belum tercukupi atau dapat di katakan bahwa indikator 19 "telepon rumah" dianggap tidak/kurang penting bagi masyarakat

### ***Analisis Potensi Penerapan Konsep Sharing Economy Pada Kawasan Minapolitan***

Untuk perumusan masalah pada nomor 3 analisis yaitu bagaimana potensi konsep *sharing economy* dapat diterapkan pada kawasan minapolitan di wilayah pesisir Kabupaten Karawang maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi potensi konsep *sharing economy* aspek yang diidentifikasi yaitu: pertama kapasitas ICT (*Information and Communication Technologies*) dalam melakukan kegiatan *Sharing Economy* dengan indikator *Ability to Pay ICT* dan *Ability to Use ICT*. Kedua kepercayaan dengan indikator pemasaran melalui teknologi *platform online*, pengolahan produk perikanan dalam hal ini berfokus kepada proses pengolahan produk perikanan dan Kerjasama antar kelompok usaha dalam mendapatkan informasi dan kepercayaan pada pemerintah sebagai mediator anatara penyedia sumber daya dengan konsumen. Ketiga fungsi regenerasi indikator yang diidentifikasi yaitu perilaku kegiatan *Sharing Economy* ini diharapkan dapat secara terus menerus diterapkan oleh penerus kelompok usaha perikanan (berkelanjutan). Keempat keunggulan berdaya saing indikator yang diidentifikasi yaitu analisis *competitiveness*,

keunggulan pada biaya, memiliki utilisasi sumber daya dan akses kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

### ***Pengembangan Kawasan Minapolitan Menggunakan Konsep Sharing Economy (Analisis SWOT)***

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kondisi minapolitan di Kabupaten Karawang berada pada kuadran IV dengan total nilai IFAS adalah -0.78, dan total nilai EFAS adalah -0.602.

#### **Kesimpulan**

Temuan dari analisis penentuan pusat kawasan adalah pada aksesibilitas di kawasan minapolitan khususnya kecamatan Banyusari memiliki kondisi jalan yang baik karena dilalui oleh jalan kolektor primer dan jalan lokal primer sehingga memudahkan aksesibilitas dari satu lokasi terhadap lokasi lainnya dan tersedianya angkutan transportasi, sedangkan pada 5 kecamatan lainnya kondisi jalannya kurang baik dan tidak mudah dijangkau oleh angkutan transportasi. Pada analisis indeks sentralitas di kawasan minapolitan menurut *Master plan* pengembangan kawasan perikanan terpadu (minapolitan) tahun 2011 Kecamatan Cilamaya Wetan sebagai kawasan minapolis dan pada uji analisis indeks sentralitas termasuk kedalam kategori hirarki I karena tersedianya kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana dan fasilitas ICT yang sudah mendukung dilihat dari indikator sentralisasi fasilitas, dalam penerapan konsep *Sharing Economy* karena kelengkapan infrastruktur yang sudah tersedia seperti sudah adanya BTS, jaringan wifi, fasilitas perbankan yang memadai, masyarakat yang sudah menggunakan *smartphone* dan sudah tersedianya layanan platform online produk perikanan walaupun masih sangat sedikit yang mengakses untuk di dalam kawasan minapolitan itu sendiri, sedangkan 5 kecamatan lainnya sebagai kawasan minapolitan sebagai sentra-sentra produksi perikanan dan pengolahan.

Nilai gap terbesar dalam penelitian ini adalah pada sarana indikator lembaga masyarakat (kelompok tambak/pengolahan) hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat merasa sudah puas dengan keberadaan lembaga masyarakat (kelompok tambak/pengolahan) pada kawasan minapolitan di wilayah pesisir Kabupaten Karawang, dan paling rendah pada indikator telepon rumah, hal ini telepon rumah masyarakat merasa tidak puas/kurang puas karena masyarakat lebih memilih menggunakan *Smartphone* yang lebih praktis dan lebih banyak fungsinya.

Dari hasil uji analisis *competitiveness* didapat komoditas ikan Bandeng nilai indeks RCA nya lebih besar dari satu (1) yakni 1.71 maka wilayah kawasan minapolitan memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata nasional untuk komoditas tersebut. Berbeda dengan komoditas udang nilai indeks RCA nya lebih kecil dari satu (1), yakni 0.77 maka keunggulan komparatif kawasan minapolitan atau wilayah untuk komoditas tersebut tergolong rendah.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kondisi kawasan minapolitan di Kabupaten Karawang berada pada kuadran IV dengan total nilai IFAS adalah -0.78, dan total nilai EFAS adalah -0.602. strategi kuadran IV berarti menandakan lemahnya sebuah organisasi dalam menghadapi tantangan, dan harus disusun strategi untuk bertahan dan menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Adapun 4 strategi utama yang dapat dilakukan, Harus mengembangkan produksi budidaya ikan bandeng tidak hanya perikanan tangkap. Harus menciptakan produk pengolahan yang baru dan inovatif contohnya nugget ikan, baso ikan, terasi udang, kerupuk udang dan kerupuk ikan dan lain-lain. Melalui pelatihan dan sosialisasi UMKM dalam industri pengolahan hasil perikanan; Penguatan Kelembagaan (UPP) harus lebih ditingkatkan agar terbentuknya kerjasama antar kelompok dan pemerintah yang didasari dengan kepercayaan termasuk kepercayaan dalam adaptasi teknologi; Dukungan pembangunan infrastruktur oleh SKPD di Kabupaten/Kota berupa sarana dan prasarana kawasan minapolitan berupa docking bengkel, perbaikan jaringan irigasi untuk mengatasi kekeringan ketika musim kemarau; Dukungan pembangunan infrastruktur oleh SKPD di Kabupaten/Kota sarana dan prasarana kawasan minapolitan untuk mendukung konsep *Sharing Economy* khususnya di bidang ICT yang terdiri dari: jaringan Wifi, alat komunikasi *smartphone* dan komputer, penambahan unit BTS untuk memperkuat sinyal hingga mencakup wilayah pelosok, pembuatan *platform* sebagai akses masyarakat untuk dapat memperdagangkan hasil produksinya secara online dan sebagai pusat data dalam ketersediaan dan harga jual, pakan komoditas perikanan.

#### **Daftar Pustaka**

Abdullah, A. S., Hidayat, J. T., Syahbandar, M. Y., Minapolitan, P. K., Minapolitan, K., Kesesuaian, T., & Pendahuluan, I. (2018).

*Arahan strategi pengembangan kawasan minapolitan kebang cirawas kabupaten banyumas.* 1–9.

- Agustine, A. D. (2017). PERENCANAAN STRATEGIS PENGEMBANGAN MINAPOLITAN (Studi di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik). *Publisia*. 2(1)
- Apriliani, Tenny., dkk. (2011). IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PELUANG PERBAIKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GOWA. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 6(2)
- Erlina, M., dan Manadiyanto. (2012). STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BERBASIS USAHA PEGARAMAN. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 2(1)
- Erwin, dkk. (2018). Design optimization of hybrid biomass and wind turbine for minapolitan cluster in Domas, Serang, Banten, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 105 012010
- Fatmawaty, dkk. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE DALAM KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH. *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 7(1)
- Firdaus, M., dkk (2017). USAHA BUDIDAYA IKAN LELE (*Clarias Sp*) PADA KAWASAN MINAPOLITAN "KAMPUNG LELE" KABUPATEN BOYOLALI. *Buletin Ilmiah Marina*. 3(2)
- Isa, I. B. Y. P. M., & Ibrahim. (2021). *Implementasi Konsep Smart City Melalui Pengembangan Wilayah Kabupaten Simeulue Idel*. 5(2), 155–164.
- Jamilah dan Mawardati. (2019). Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap pada Kawasan Minapolitan. *JEPA - Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 3(2)
- Lamia, L., dkk. (2017). KETERSEDIAAN PRASARA SARANA DALAM Mendukung Kawasan Minapolitan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Spasial*. 4(2)
- Nugroho, Agus., dkk (2020). PENGUATAN STRATEGI UNTUK PENGEMBANGAN MINAPOLITAN KABUPATEN CILACAP. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 15(2)
- Purnomo, A. H. (2012). *KESIAPAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MINAPOLITAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA*. 2(1), 27–39.
- Rohayah, I., & Hendarto, M. (2021). Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Tahun 2013-2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 20–30.
- Santoso, E., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 17 - 32. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.351>
- Saragih, B., Pambudy, R., & Dabukke, F. B. M. (2018). *Agribisnis : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. PT Penerbit IPB Press. <https://books.google.co.id/books?id=pLkREAAQBAJ>
- Sundararajan, A. (2017). *The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*. MIT Press. <https://books.google.co.id/books?id=tg38DwAAQBAJ>
- Surbakti, A., dkk (2019). ANALISIS TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR PENDUDKUNG KAWASAN MINAPOLITAN PETASIA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA. *Spasial*. 6(1)
- Suryawati, S., dan Purnomo, A. (2011). ANALISIS EX-ANTE KEBERLANJUTAN PROGRAM MINAPOLITAN. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 6(1)
- Utpalasari, R., dan Anwar, S. (2018). ANALISIS TANGGAPAN PEMBUDIDAYA TERHADAP KEGIATAN BUDIDAYA IKAN DI KAWASAN MINAPOLITAN KECAMATAN GANDUS KOTA PALEMBANG. *Societa*. 7(2)
- Yusuf, M., Budiharjo, A., & Maulyda, M. A. (2021). Dampak Pembangunan Minapolitan Terhadap Kinerja Lalu Lintas . *Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu Dan Aplikasi Teknik*, 20(1), 73–82. <https://doi.org/10.26874/jt.vol20nol.373>